

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pers merupakan sebuah institusi sosial yang menjadi wahana komunikasi massa sebagai pelaksana kegiatan jurnalistik dengan berbagai bentuk dan medianya. Pers menjadi bagian yang teramat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pers juga memainkan peranan yang amat besar dalam mewartakan berita dan sudut pandangnya dalam rangka merespons berbagai persoalan dan peristiwa yang terjadi dengan memberikan kesaksiannya yang aktual. Sejak masa Hindia Belanda, Pers digunakan sebagai sarana dan alat perjuangan, yang mana melalui pers semua kehendak dapat disalurkan kepada publik.

Dalam sejarah Indonesia, pers telah menjadi elemen kritis dalam membentuk dan memandu opini publik. Khususnya, pada masa-masa tertentu yang ditandai oleh ideologi liberal dan terpimpin, dinamika peran media pers mengalami perubahan yang signifikan. Seiring dengan perjalanan panjang ini, fungsi serta peran dari pers pun berangsur-angsur bergeser mengikuti perubahan yang terjadi pada sistem politik dan pemerintahan, tentu tidak luput juga dari pengaruh kondisi dan kebutuhan tiap zamannya yang berbeda.

Dari sudut pandang politik, pers dapat dikatakan merupakan pilar keempat penyelenggaraan organisasi negara setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Manan, 2010). Dalam sistem demokrasi, salah satu fungsi politik dari pers yaitu menjadi sarana kontrol dan penjaga keseimbangan kegiatan politik baik dalam lingkungan supra struktur maupun infra struktur (Manan, 2010). Kebebasan pers

merupakan prasarat utama bagi demokrasi, trias politika dalam teori John Locke yang diberlakukan di Indonesia juga membutuhkan kebebasan pers supaya demokrasi dapat berkembang (Syafriadi, 2018). Sehingga, dapat dikatakan bahwa pers adalah salah satu pilar demokrasi dan kemerdekaan pers adalah suatu keharusan.

Kebebasan pers adalah prinsip yang menegaskan bahwa media massa termasuk surat kabar memiliki hak untuk mengumpulkan, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi atau opininya tanpa ada campur tangan, sensor, atau bahkan intimidasi dari pihak manapun, termasuk pihak pemerintah. Kebebasan pers ini merupakan bagian yang penting dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang sudah dijamin. Kebebasan pers pun penting demi menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan berpendapat dalam suatu negara.

Kebebasan pers adalah sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas hidupnya (Shaffat, 2008). Menurut John C. Merrill (Syafriadi, 2018), “kemerdekaan pers” adalah kondisi yang memungkinkan para pekerja pers memilih menentukan mengerjakan tugas mereka sesuai dengan keinginan mereka. Kemerdekaan pers atau kebebasan pers ini pada hakikatnya sudah diatur dalam UUD 1945, yakni pada Pasal 28 disebutkan: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pada periode di sekitar Orde Lama, secara konstitusi pers juga dijamin oleh UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950

pasal 19 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengemukakan pendapat.

Dalam Sejarah perkembangan pers di Indonesia, salah satu masalah yang menonjol adalah pelarangan terbit atau “pembreidelan” terhadap surat kabar (Tim Penelitian Sejarah Pers di Indonesia, 1983). Corak pemerintahan serta arah kebijakan yang berbeda pada periode Demokrasi Terpimpin dibandingkan dengan periode Demokrasi Liberal membawa implikasi bagi kehidupan dan perkembangan pers di Indonesia. Membangun bangsa yang baru merdeka ternyata tidak mudah, karenanya muncul berbagai persoalan dan konflik kepentingan yang menyebabkan kebebasan pers ada dalam bayang-bayang kepentingan kekuasaan (Shaffat, 2008).

Pada masa Demokrasi Liberal, pers digunakan sebagai sarana kebebasan berkespresi, pluralisme, dan informasi yang objektif. Sementara, pada era Demokrasi Terpimpin, pers dijadikan alat untuk menyampaikan narasi yang mendukung ideologi pemerintah dan mengarahkan opini publik sesuai dengan agenda politik. Pada masa Demokrasi Terpimpin kebebasan pers dibungkam demi kepentingan pemeliharaan ketertiban umum dan perseteruan politik (Shaffat, 2008).

Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri sistem Pers Bebas yang dianut sejak awal revolusi (Pratama, 2018). Kebebasan pers di masa Demokrasi Terpimpin memiliki berbagai tantangan yang berakar dari kebijakan pemerintah. Kebebasan pers yang sebelumnya berkembang selama masa Demokrasi Liberal kemudian berangsur-angsur tereduksi, karena pemerintah memanfaatkan surat kabar dan media massa sebagai alat propaganda resmi untuk membentuk opini publik yang sesuai dengan kepentingannya.

Demokrasi Terpimpin merupakan suatu sistem yang tidak tetap, yang dilahirkan dari krisis dan terus-menerus berubah sepanjang masa yang paling kacau dalam sejarah Indonesia sejak Revolusi (Ricklefs, 1998). Perubahan pada sistem ini dimulai ketika Presiden Soekarno menunjukkan ketidaksenangannya terhadap konsep Barat dalam Demokrasi Parlementer di Indonesia yang diungkapkan pada Februari 1957. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 secara resmi menutup masa Demokrasi Liberal. Dengan dekrit tersebut Soekarno membubarkan Majelis Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, membentuk Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Perancang Nasional. Dua hari kemudian, Presiden Soekarno mengumumkan Kabinet Kerja, yang di dalamnya Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri, sementara Djuanda menjadi Menteri Utama.

Ideologi ‘Demokrasi Terpimpin’ pertama kali diungkap ke publik dalam pidato Soekarno pada perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1959 yang dalam beberapa bulan kemudian dinamakan sebagai Manipol (Manifesto Politik). Di awal 1960-an ungkapan Manipol ini kemudian ditambahkan dengan kata USDEK, sebuah akronim dari beberapa unsur seperti UUD 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol-USDEK diperkenalkan di berbagai tingkat pendidikan dan instansi pemerintahan, termasuk juga pers yang diharuskan mendukungnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, kekuatan politik pada masa itu terpusat di tangan Presiden Soekarno dengan TNI AD dan PKI di sampingnya (Poesponegoro, 2008). Sepanjang tahun 1960-an, pihak militer meningkatkan pengaruhnya terhadap pemerintahan sipil. Di lain sisi PKI semakin memperjelas strateginya

dalam mendekati presiden, yaitu dengan membentuk citra sebagai *Pancasilais* dan pendukung kebijakan Presiden Soekarno, serta dengan pemanfaatan ajaran Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) ciptaan Presiden Soekarno. Sejak tahun 1963, PKI berupaya keras untuk duduk dalam kabinet, karna merasa bahwa kedudukannya dalam kancah politik cukup kuat. Seiring dengan berjalannya waktu, konflik dan persaingan di antara Presiden Soekarno dan PKI dengan TNI AD semakin memanas.

Sepanjang kurun waktu 1959-1965 Indonesia mengalami peningkatan ketegangan politik dalam waktu yang bersamaan. Beberapa pihak percaya bahwa Demokrasi Terpimpin berakhir di tahun 1965 segera sesudah terjadinya Peristiwa Gerakan 30 September 1965. Di tengah suasana politik yang bergejolak pada tahun-tahun tersebut, peran media massa menjadi amat penting dalam membentuk opini publik dan menyuarakan berbagai aspirasi dari rakyat meskipun media massa mendapatkan tekanan dari pemerintah. Salah satu media massa yang menonjol dalam dinamika tersebut adalah surat kabar *Merdeka* milik B.M Diah.

Menurut penuturan Andi Suwirta (2008), sepanjang periode kepemimpinan Soekarno termasuk era Demokrasi terpimpin, terdapat fenomena kemunculan surat-surat kabar yang menjadi media dari berbagai kekuatan politik. Sebagian surat kabar Republik kala itu telah membawa suara partai atau organisasi masing-masing (Said, 1987). Surat kabar-surat kabar tersebut tampil sejalan dengan posisi partai-partai yang mereka wakili dalam masalah yang dihadapi. Penampilan semacam ini pada masa Liberal berlanjut hingga masa Demokrasi Terpimpin yang kemudian memunculkan berbagai polemik seperti perang pendapat dan saling serang.

Beberapa di antaranya seperti *Suluh Indonesia* milik PNI, *Harian Abadi* milik Masyumi, *Berita Indonesia* milik Partai Murba, *Bintang Timur* milik Partindo, dan *Harian Rakjat* milik PKI.

Selain media massa milik berbagai kekuatan politik tersebut, ada pula pers yang relatif independen yang tidak terikat dengan kekuatan politik manapun. Jenis pers semacam ini disebut juga dengan *personal journalism* (Suwirta, 2008). Jurnalisme semacam ini menampilkan liputannya dengan ‘suara’ serta sikap yang senada dengan pandangan pemimpin redaksinya, seperti halnya *Merdeka* yang tidak bisa dipisahkan dari idealisme seorang B.M. Diah, *Pikiran Rakjat* dengan sosok Djamal Ali, *Kedaulatan Rakjat* dengan sosok Madikin Wonohito, *Suara Merdeka* dengan sosok Mohamad Hetami, serta surat kabar lainnya baik yang bersifat nasional maupun lokal atau daerah.

Surat Kabar *Merdeka* adalah salah satu surat kabar yang mengiringi perjalanan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka. Lahir sejak masa revolusi fisik Indonesia tahun 1945 menjadi pers *Republiken* pada masa itu. Pendiri surat kabar ini ingin memberikan pada bangsa dan negara, sebuah sarana dan alat perjuangan yang ampuh, yang bernama surat kabar (Chaniago, 1987). Nama “Merdeka” sendiri dipilih oleh B.M. Diah karena pada masa itu kata “merdeka” merupakan salam nasional yang paling umum. Menurut B.M Diah, harian *Merdeka* dengan keyakinannya sendiri yang murni, memberikan tugas sejarah pada diri sendiri sebagai “Suara Rakyat Republik Indonesia”.

Selama periode Demokrasi Terpimpin seluruh surat kabar harus merelakan sebagian besar halaman dalam lembarannya untuk memuat wacana-wacana

ideologis pemerintah, kemudian menyisakan sedikit bagian untuk berita-berita yang murni hasil liputan jurnalisnya sendiri. Kemudian, muncul pula kecenderungan pers yang saling berkompetisi dan mengklaim sebagai pers yang paling revolusioner dan setia dengan Presiden Soekarno. Sementara itu pers-pers independen yang kritis dan bebas sudah tidak ada lagi, beberapa di antaranya yang berbasis di Jakarta seperti *Indonesia Raya*, *Times of Indonesia*, dan *Nusantara* mengalami involusi pandangan dan gagasan (Suwirta, 2008). Begitu pula dengan surat kabar independen yang berbasis di daerah seperti *Kedaulatan Rakyat* (Yogyakarta) dan *Pikiran Rakjat* (Bandung) yang juga mengalami pengawasan dan dibatasi khususnya yang berkaitan dengan kritik keras terhadap pemerintah.

Hal ini menggambarkan bagaimana pers saat itu benar-benar telah terkooptasi dan mengalami “manipolisasi”. Hal-hal yang dialami oleh surat-surat kabar independen tersebut dialami pula oleh surat kabar *Merdeka* yang berbasis di Jakarta. Media massa dengan cakupan yang meluas hampir ke seluruh Indonesia ini diharuskan pula mengikuti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, meskipun pimpinan redaksinya memiliki kedekatan secara historis dengan Presiden Soekarno.

Sejak awal penerbitannya, surat kabar *Merdeka* sudah menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari *headline* utama yang terbit pada 1 Oktober 1945 yaitu “Bendera Nasional Indonesia Tetap Berkibar Teroes” yang dicetak dengan huruf besar dan tebal (Suwirta, 2008) serta beberapa artikel lainnya yang menyatakan sikap mendukung kemerdekaan Indonesia. Selama masa Revolusi Fisik surat kabar *Merdeka* telah berperan dan berkontribusi sangat

signifikan, dimulai dengan penggambaran opini melalui karikatur atau kartun politik, pembawaan berita, dan pemasangan berbagai macam jenis iklan.

Pemilihan surat kabar *Merdeka* sebagai fokus dalam penelitian ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, salah satunya adalah karena surat kabar *Merdeka* merupakan salah satu surat kabar besar yang punya pengaruh cukup besar pada zamannya dan merupakan surat kabar nasional yang persebarannya luas. Besarnya nama B.M Diah juga membuat surat kabar ini menjadi surat kabar besar di masa itu, dan ini pula yang menjadi alasan penulis memilihnya sebagai topik utama penelitian ini.

Walaupun pada masa itu *Merdeka* masih tergolong surat kabar baru, terbitannya sangat dinanti-nanti dan menjadi rebutan masyarakat, bahkan pendistribusiannya meluas dari Jakarta hingga di luar pulau Jawa. Hal ini terlihat pada tiga bulan pertama penerbitan (Oktober-Desember 1945) surat kabar *Merdeka* telah mencapai oplah sampai 25.000 eksemplar. Pada mulanya persebarannya hanya berlaku di Jakarta dan sebagian Jawa Barat, tapi kemudian meluas hingga ke Sumatera dan beberapa pulau lain di luar Jawa (Chaniago, 1987).

Hal menarik yang mendasari penulis memutuskan untuk menggali lebih dalam mengenai kebebasan pers di masa Demokrasi Terpimpin adalah karena masa ini mencerminkan paradigma politik yang sangat berbeda dengan masa sebelumnya yaitu Demokrasi Liberal, seperti yang sudah disinggung di atas. Di zaman Demokrasi Liberal mass media Indonesia mempunyai kebebasan mutlak (Kakailatu, 1997). Kebebasan pers dianggap sebagai pilar utama dalam mewujudkan demokrasi dan memberikan ruang yang beragam suara masyarakat.

Berbeda dengan yang terjadi pada masa Terpimpin, dimana pers sering diarahkan untuk menjadi alat propaganda ideologi, diarahkan untuk membentuk persepsi publik sesuai dengan pandangan pemerintah. Di masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno lebih cenderung memperlakukan pers sebagai *extension of power*-nya (Efendi, 2010). Mereka yang menentang asas-asas Demokrasi Terpimpin tidak akan “aman” mengutarakan pendapatnya (Feith, 1988). Pada saat itu pers diatur secara ketat dan harus berfungsi sebagai alat revolusi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi dinamika dalam kehidupan dan kebebasan pers di Indonesia.

Periode 1960-an, tekanan terhadap pers yang bebas di Indonesia semakin keras (Suwirta, 2008). Ketiadaan kebebasan pers di tahun 1960-an dibuktikan juga dengan adanya kebijakan penghapusan kolom “catatan pojok” dalam surat kabar. Perlu diketahui bahwa kolom ini merupakan ciri khas dari pers Indonesia yang terletak di pojok sebuah halaman surat kabar yang isinya singkat dan berisi kritik-kritik sosial yang bernada humor dan sarkastik. Tiap surat kabar memiliki nama penjaga kolom yang berbeda-beda, umumnya diambil dari nama atau sebutan yang populer. *Merdeka* sendiri menamainya dengan “Notes: Dr. Clenik”. Namun, sejak 1 November 1960 kolom “Clenik” tidak lagi dicantumkan oleh *Merdeka*. Mei 1965, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai pers, yang mana sejalan dengan politik Nasakom, pers harus menginduk kepada kekuatan-kekuatan sosial-politik yang diakui keberadaannya oleh pemerintah. Dalam hal ini pers yang tidak mempunyai afiliasi dianggap sebagai institusi individualis yang liberal, mengambang, dan tidak revolusioner.

Berdasarkan temuan penulis pada tulisan-tulisan ilmiah terdahulu, penulis mendapati bahwa penelitian mengenai surat kabar *Merdeka* sebelumnya sudah pernah dilakukan namun dengan periodisasi dan konteks yang berbeda. Tulisan Abi Bondan adalah salah satunya, dalam skripsinya yang berjudul “Peranan dan Kontribusi Surat Kabar *Merdeka* pada Masa Revolusi Fisik (1945-1949)”. Dalam skripsi tersebut dijabarkan bagaimana peranan serta kontribusi *Merdeka* selama Revolusi Fisik, dan penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut pada periode setelahnya, yaitu pada masa Demokrasi Terpimpin, juga dengan konteks yang berkaitan dengan krisis kebebasan pers.

Sejauh ini belum ditemui literatur ilmiah lain dengan bahasan terkait surat kabar *Merdeka* pada masa Demokrasi Terpimpin yang lebih spesifik. Topik dengan periodisasi ini baru ditemukan dalam buku karya J.R. Chaniago yang berjudul “Ditugaskan Sejarah: Perjuangan Merdeka 194-1985”, namun dengan pembahasan yang lebih general. Selain tulisan Abi Bondan, tulisan Andi Suwirta berjudul “Suara dari Dua Kota: Revolusi Indonesia dalam Pandangan Surat Kabar *Merdeka* (Jakarta) dan *Kedaulatan Rakyat* (Yogyakarta)” tahun 2008 juga berfokus pada masa Revolusi Fisik.

Begitu juga dengan tulisan-tulisan lainnya yang membahas surat kabar *Merdeka* berdasarkan sudut pandangnya terhadap isu-isu atau peristiwa-peristiwa yang ada sepanjang periode Orde Baru, seperti dua karya Andi Suwirta berjudul “Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Kasus Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984 dalam Pandangan Surat Kabar *Merdeka* dan *Kompas* di Jakarta” tahun 2017 dan “Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Peristiwa MALARI dalam

Pandangan Surat Kabar *Merdeka* dan *Indonesia Raya*” tahun 2018, serta tulisan Marini Agustyna tahun 2016 yang berjudul “Strategi Kampanye Politik Golkar pada Pemilihan Umum 1977-1987: Dalam Perspektif Pemberitaan di Surat Kabar *Suara karya* dan *Merdeka*”.

Dalam tulisan Andi Suwirta yang bertajuk “Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950-1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional” yang ditulis tahun 2008, Andi menuliskan bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan pada kebebasan pers dalam rentang waktu 1950-1965. Pada masa-masa awal pengakuan kedaulatan (1950-1956), pers Indonesia merasakan kebebasan dan keleluasaan, tanda-tanda kebebasan menyurut dimulai setelah tahun 1957 mengikuti bergantinya kabinet pemerintahan. Tulisan Andi Suwirta ini memberikan gambaran yang lebih general terkait dengan dinamika kehidupan pers di era Soekarno dan penulis tertarik untuk membahasnya lebih dalam dengan mengambil sudut pandang surat kabar *Merdeka*.

Melihat dari tulisan-tulisan terdahulu yang sudah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa topik terkait surat kabar *Merdeka* yang berfokus pada periode Demokrasi Terpimpin dan lebih mendalam masih jarang ditemui. Karena hal ini didukung dengan berbagai pertimbangan penulis, maka penulis merasa perlu adanya tulisan yang membahas lebih dalam mengenai surat kabar *Merdeka* pada masa Demokrasi Terpimpin, sebab masa ini adalah masa krusial seperti yang sudah disebutkan pada paragraf-paragraf sebelumnya. Karenanya, penulis memutuskan untuk menjadikannya sebagai topik dalam penelitian ini.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih terfokus, terarah dan tidak meluas dari ruang lingkup pembahasannya, maka penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian ini baik secara spasial maupun temporal. Batas spasial dalam penelitian ini adalah wilayah Jakarta. *Merdeka* merupakan surat kabar nasional yang persebarannya meluas ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, sehingga Jakarta dipilih oleh penulis sebagai batasan spasial, sebab wilayah ini merupakan tempat dimana kantor pusat Merdeka Press berdiri, juga menjadi daerah utama persebaran *Merdeka*.

Sedangkan secara temporal, penelitian ini terbatas pada rentang waktu yakni 1960 hingga 1965 yang masuk ke dalam periode Demokrasi Terpimpin. Alasan dipilihnya periodisasi ini sebagai batasan temporal adalah karena tahun 1960 menjadi tahun dimulainya periode manipulasi pers yang ditandai dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Di dalamnya disebutkan tentang Penerangan Massa yang menjadi landasan bagi pelaksanaan manipulasi pers nasional dalam sistem Demokrasi Terpimpin (Said, 1987).

Kebijakan tersebut kemudian dipertegas dengan Peraturan Peperti No. 10/1960 pada 13 Oktober 1960 tentang Surat Izin Terbit. Yang mana berdasarkan aturan ini, seluruh surat kabar atau majalah harus memenuhi tujuh persyaratan untuk mengajukan izin terbit dan harus menandatangani formulir dengan 19 pasal pernyataan. Aturan Peperti ini dilengkapi dengan Surat

Presiden No. 3569/HK/1960. Di sinilah awal dari periode “pers terpimpin”, mengikuti sistem politik Demokrasi Terpimpin yang secara resmi dimulai. Kebijakan-kebijakan terkait manipulasi pers yang sudah disebutkan di atas tentunya berimplikasi bagi surat kabar *Merdeka*.

Sementara dipilihnya tahun 1965 sebagai batas akhir periodisasi penelitian adalah karena pada tahun ini surat kabar *Merdeka* mengalami pembredelan karena tergabung dalam Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS), sebuah perkumpulan pers anti-PKI. BPS merupakan sebuah badan yang dibentuk berakar dari pergerakan “*ofensif revolusioner*” yang dilakukan PKI dan organisasi-organisasi penyokongnya dalam segala bidang, dalam hal ini termasuk dalam badan-badan pers seperti PWI. Pembrangusan *Merdeka* merupakan buntut dari dibubarkannya BPS yang menjadi badan terlarang atas perintah Presiden Soekarno.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan penulis dalam bagian dasar pemikiran dan pembatasan masalah, maka berikut ini adalah dua rumusan masalah yang penulis ajukan untuk penelitian ini:

- a) Mengapa terjadi krisis kebebasan pers di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin?
- b) Bagaimana sepak terjang dan strategi surat kabar *Merdeka* di tengah krisis kebebasan pers pada masa Demokrasi Terpimpin?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka adapun tujuan dari dilakukannya penelitian historis berjudul “Surat Kabar *Merdeka* dalam Arus Krisis Kebebasan Pers Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1960-1965)” ini adalah untuk mengkaji serta menguraikan bagaimana surat kabar *Merdeka* beradaptasi atau menghadapi arus krisis kebebasan pers selama periode Demokrasi Terpimpin (1960-1965) dengan strateginya tersendiri sebagai media massa yang menjadi pilar demokrasi. Dengan menganalisis konteks historis dan politik saat itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang dinamika pers di Indonesia di tengah situasi politik Demokrasi Terpimpin yang represif.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini dapat dijabarkan menjadi dua, yaitu kegunaan secara teoritik dan praktik. Secara Teoritik hasil dari penelitian ini diharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan juga pembaca mengenai pembatasan kebebasan pers pada masa Demokrasi Terpimpin yang dilihat dari sudut pandang surat kabar *Merdeka*. Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan, serta memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu kesejarahan terutama di Indonesia. Penulis juga berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai pijakan atau landasan dan referensi bagi penelitian-penelitian sejarah selanjutnya yang berkaitan dengan sejarah

Indonesia masa Demokrasi Terpimpin, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan pers di Indonesia.

Secara Praktik penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana latihan dalam melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah kesejarahan. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi refleksi dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam menelaah setiap kelebihan dan kekurangan kebijakan pers dalam masa ini, serta dampaknya sebagai bahan untuk membentuk dan membenahi kebijakan pers di masa mendatang. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan menjadi suatu bahan pembelajaran bagi pemerintah dan pers sendiri agar dapat mengantisipasi jika menghadapi permasalahan serupa di masa mendatang. Selain itu, bagi penulis sendiri, penelitian ini secara praktik merupakan suatu bentuk dari upaya keras penulis untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

D. Kerangka Analisis

Dalam upaya sebuah penelitian tentunya tidak dapat dilepaskan dari penggunaan teori sebagai acuan di dalamnya, tidak terkecuali dalam penelitian sejarah. Terdapat 4 (empat) teori pers yang menjadi sumber dari teori-teori pers normatif saat ini, keempat teori ini dikemukakan oleh Siebert, Peterson, dan Schramm dalam buku berjudul "*Four Theories of the press*". Keempat teori tersebut yaitu Teori Pers Otoriter, Teori Pers Bebas (Libertarian), Teori Pers Komunis Soviet, dan Teori Pers Bertanggung Jawab Sosial (Sosial Responsibility Theory). Dari keempat teori tersebut, penulis memilih untuk menggunakan Teori Pers Otoriter dalam penelitian ini.

Di antara keempat teori tersebut, teori pers otoriter – atau disebut juga otoritarian – adalah teori yang tertua. Dikembangkan pada abad ke-16 yang mana saat itu kaum monarki kerajaan menjadi penguasa. Teori yang dikemukakan oleh Siebert ini beranggapan bahwa negara sebagai ekspresi tertinggi dari organisasi kelompok manusia yang mengungguli masyarakat dan individu. Dalam hal ini negara merupakan hal paling penting dalam pengembangan manusia seutuhnya, karena melalui negara manusia dapat mencapai tujuannya yang dalam artian lain manusia tanpa negara akan tetap menjadi manusia primitif (Saptohadhi, 2011).

Teori ini menyebutkan bahwa fungsi pers adalah media penyampai keinginan para penguasa kepada rakyat atau mengabsahkan kebenaran versi para penguasa di hadapan rakyat. Teori ini juga dikenal sebagai teori kontrol terhadap pers. Dalam teori pers otoritarian kebebasan pers hampir tidak ada, bahkan walaupun ada relatif rendah tingkatannya (Gayatri, 2023). Hal ini jelas, sebab teori ini erat kaitannya dengan sistem pengawasan terhadap media massa – yang daya pengaruhnya dinilai sangat kuat, bahkan pers disebut-sebut sebagai kekuasaan keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dalam sistem pers otoriter penguasa punya peranan utama dalam kehidupan pers, seperti bagi orang yang ingin menerbitkan pers, dia terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari penguasa, dan izin ini diikuti dengan penyensoran yang sangat ketat oleh penguasa terhadap berita yang tidak sesuai keinginan penguasa. Pers boleh mengeluarkan kritiknya sejauh tidak bertentangan dengan *status quo* rezim yang berkuasa (Masduki, 2007). Otoritasi atas perizinan media sepenuhnya

ada di tangan penguasa atau pemerintah sehingga izin sewaktu-waktu dapat dicabut secara sepihak oleh pemerintah dan penyensoran diperketat.

Berdasarkan uraian mengenai Teori Pers Otoriter tersebut, melalui pertimbangan dan analisis penulis teori tersebut dapat dikatakan relevan untuk diaplikasikan dalam penelitian ini, karena berkaitan dengan topik yang akan dibahas yaitu krisis kebebasan pers pada masa Demokrasi Terpimpin. Realita yang ada pada masa Demokrasi Terpimpin mencerminkan apa yang disampaikan oleh teori ini, yaitu bagaimana rezim mengontrol pers sebagai alat kekuasaannya. Wujud dari otorisasi pemerintah atas pers di masa Demokrasi Terpimpin terlihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mengarahkan pers untuk menjadi alat revolusi dan alat propaganda pemerintah. Surat kabar *Merdeka*, seperti halnya media massa lainnya di masa itu, menghadapi tantangan berupa tekanan politik yang mengharuskan mereka menyeimbangkan antara pewartaan berita yang jujur, kritis, dan objektif dengan risiko pemerintah yang represif. *Merdeka* harus menghadirkan liputan yang informatif meskipun harus tetap selaras dengan batasan dan tekanan rezim masa itu.

Selain Teori Pers Otoriter, dalam penelitian ini digunakan pula Teori Hegemoni oleh Antonio Gramsci sebagai teori pendukung dalam kerangka analisis. Titik awal konsep hegemoni Gramsci adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara-cara kekerasan dan persuasi (Simon, 2000). Namun, konsep hegemoni yang dikemukakan oleh Gramsci bukan kekuasaan yang didapat melalui kekerasan dan penindasan. Hegemoni Gramsci lebih merujuk pada mewujudkan pemahaman dan kesepakatan

kolektif, yakni upaya menggiring orang lain untuk menilai dan memandang suatu problematika sosial dalam kerangka yang sudah ditentukan.

Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus dibanding melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya, yang mana mekanisme konsensus ini dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui institusi yang ada di masyarakat (Patria, 1999). Hegemoni bukan sekadar menindas kelompok lain, namun lebih kepada memenangkan atau mendapatkan dukungan kelompok lain melalui kesepakatan bersama dan kesepakatan ini dibangun melalui berbagai cara, salah satunya adalah melalui lembaga-lembaga yang ada di masyarakat.

Kata kunci dalam pemahaman teori hegemoni Gramsci adalah negosiasi (Harjito, 2009). Negosiasi dibutuhkan agar konsensus dapat tercapai dengan kerelaan dan dapat diterima oleh semua kelompok. Hegemoni merupakan suatu organisasi konsensus (Simon, 2000). Teori hegemoni ideologi Gramsci berfokus pada pembentukan kesadaran massa (Tami, 2021). Ini berarti hegemoni bukan hanya sekadar dominasi paksa suatu pihak, tetapi lebih merupakan upaya membangun kesepakatan dari kelompok yang diperintah melalui pembentukan pemahaman atau kesadaran kolektif mengenai nilai-nilai, norma, dan ideologi yang dilegitimasi. Pembentukan pemahaman kolektif tersebut dilakukan melalui berbagai institusi seperti media massa dan pendidikan, yang nantinya akan menanamkan ideologi penguasa dalam alam kesadaran masyarakat secara halus.

Ideologi dipandang oleh Gramsci memiliki pengaruh yang sangat signifikan sebagai kekuatan material maupun politik. Teori hegemoni Gramsci digunakan

sebagai kerangka analisis terutama dalam memahami bagaimana kekuasaan dan kontrol ideologis dijalankan oleh pemerintah Demokrasi Terpimpin. Dalam konteks Demokrasi Terpimpin dibawah rezim Soekarno, hegemoni terlihat dalam upaya membentuk kesadaran kolektif masyarakat melalui propaganda politik dan kontrol terhadap pers sebagai media massa. Pemerintah menggunakan ideologi sebagai alat untuk memperkuat kekuasaannya dan menekan pihak oposisi.

Teori Hegemoni Gramsci juga digunakan untuk menganalisis pembatasan kebebasan pers yang dilakukan pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin sebagai salah satu upaya membangun dan mempertahankan dominasinya. Di masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah membatasi kebebasan pers dengan menutup atau mengendalikan media massa (surat kabar) yang dianggap tidak sejalan dengan Manipol sebagai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) saat itu. Melalui pengendalian terhadap media, negara berupaya membentuk opini publik yang kolektif sesuai dengan kepentingannya. Pemerintah membangun legitimasi atas kebijakan-kebijakannya melalui narasi yang disebarluaskan oleh pers yang telah dikendalikan. Ditambah lagi dengan adanya alat-alat represif seperti sensor dan penutupan atau pembredelan pers yang menunjukkan strategi hegemonik untuk mempertahankan dominasi ideologi negara.

E. Metode dan Bahan Sumber

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode historis yang ingin mengkaji krisis kebebasan pers di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin yang diambil dari sudut pandangan surat kabar *Merdeka* dalam kurun tahun 1960-1965. Dalam penelitian historis ini penulis menggunakan lima tahapan berdasarkan buku

Pengantar Ilmu Sejarah yang ditulis oleh Kuntowijoyo, yakni: (1) Pemilihan topik, (2) Heuristik pengumpulan sumber, (3) Verifikasi atau kritik sumber, (4) Interpretasi: analisis dan sintesis, (5) Penulisan.

Sedangkan, penulisan penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Penulisan sejarah umumnya dibedakan menjadi dua macam pendekatan, yaitu deskriptif-naratif dan deskriptif-analitis. Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif-analitis mendalami penulisan sejarah yang menerangkan kausalitasnya atau menjawab pertanyaan “mengapa”. Dengan pendekatan ini penulisan ini bersifat analitis dan perlu menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial beserta teorinya. Implikasinya dengan penelitian ini adalah peneliti menggunakan dua teori relevan, yaitu teori pers otoriter dan teori hegemoni Antonio Gramsci yang sudah diuraikan sebelumnya pada bagian kerangka analisis.

Tahapan pertama yaitu pemilihan topik, menurut Kuntowijoyo, topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Dalam penelitian ini, peneliti memilih topik mengenai “Surat Kabar *Merdeka* dalam Arus Krisis Kebebasan Pers Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965” dengan berbagai pertimbangan, utamanya adalah didasarkan atas ketertarikan penulis pada dunia pers dan jurnalistik, terutama setelah penulis mendalami mengenai pers masa Demokrasi Terpimpin yang menjadi materi presentasi dalam mata kuliah jurnalistik. Di samping itu, keingintahuan penulis yang mendalam terkait surat kabar *Merdeka* milik B.M Diah, salah satu tokoh yang muncul dalam peristiwa Proklamasi 1945, juga menjadi dasar dan pertimbangan pemilihan topik.

Dipilihnya surat kabar *Merdeka* sebagai topik utama adalah didasarkan pada besarnya nama surat kabar bentukan B.M. Diah tersebut dalam kancah persuratkabaran di Indonesia khususnya pada masa Demokrasi Terpimpin. Sebagai surat kabar yang telah lahir sejak masa Revolusi Fisik dan tumbuh bersama dengan Indonesia, *Merdeka* menjadi surat kabar yang mempunyai peranan yang amat signifikan dan dapat dikatakan sebagai surat kabar yang menemani perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka. *Merdeka* pun tampil sebagai surat kabar yang menonjol dalam kancah perpolitikan masa Demokrasi Terpimpin.

Sementara itu, Demokrasi Terpimpin sendiri dipilih sebagai periodisasi dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan yang sudah lebih dalam dibahas pada bagian sebelumnya, di antaranya adalah karena periode ini menggambarkan realitas yang cukup jauh berbeda dengan yang ada pada masa Demokrasi Liberal dalam sistem politik yang berimbas pada kebebasan pers. Di masa ini kebebasan pers yang semula ada pada masa Liberal tidak lagi didapatkan oleh media massa. Perbedaan tersebut dapat pula dilihat dari peralihan fungsi pers yang semula sebagai media penyampai suara masyarakat yang bebas dan beragam, menjadi sebuah alat revolusi atau alat propaganda pemerintah, hingga pers sendiri mengalami apa yang disebut sebagai 'manipulasi'. Di tengah pembatasan terhadap kebebasan pers ini, *Merdeka* tampil sebagai surat kabar dengan strateginya tersendiri agar tetap berdiri sebagai surat kabar independen menyeimbangkan antara prinsip objektivitasnya dengan kewajibannya sebagai pers yang termanipulasi.

Tahap selanjutnya setelah memilih topik adalah heuristik atau mengumpulkan sumber. Sumber (sumber sejarah disebut juga data sejarah; data dari bahasa Inggris

datum atau data) yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis (Kuntowijoyo, 2013). Pada penelitian ini, akan digunakan sumber-sumber berupa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber-sumber tersebut penulis kumpulkan melalui penelusuran di berbagai tempat perpustakaan seperti Perpustakaan Nasional RI Merdeka Selatan, Perpustakaan Nasional RI Salemba, perpustakaan UPT UNJ, perpustakaan Jakarta Cikini, perpustakaan SMAN 107 Jakarta, Ruang Baca Sejarah Gedung FISH, dan laman-laman online lainnya yang tersedia di internet seperti Google Scholar.

Sumber primer yang akan penulis gunakan adalah berupa arsip-arsip koran sezaman yang diterbitkan oleh surat kabar *Merdeka* selama rentang tahun 1960-1965, berupa pula buku yang membahas khusus mengenai *Merdeka* yang ditulis oleh Chaniago berjudul *Ditugaskan Sejarah: Perjuangan Merdeka 1945-1985*, terbit pada tahun 1987 yang menuliskan secara khusus dan mendalam tentang surat kabar *Merdeka*. Sementara, sumber sekunder yang akan digunakan adalah sumber tertulis berupa buku-buku kesejarahan yang membahas mengenai pemerintahan Demokrasi Terpimpin secara umum dan buku-buku yang membahas mengenai perkembangan pers atau jurnalistik di Indonesia secara khusus.

Beberapa buku yang penulis gunakan adalah *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia* buku dari proyek penelitian penerangan Departemen Penerangan RI yang diterbitkan tahun 1980, *Sejarah Pers Indonesia* terbitan oleh Soebagijo tahun 1977, buku karya Tribuana Said *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila* yang terbit pada tahun 1987, *Garis Besar Perkembangan Pers* dari Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) tahun 1971, serta buku

Sejarah Pembreidelan Pers di Indonesia tulisan Edward Smith tahun 1983. Buku-buku tersebut menuliskan tentang perkembangan pers di Indonesia secara umum. Penulis juga menggunakan buku Oey Hong Lee *Indonesian Government and Press During Guided Democracy* tahun 1974 yang membahas secara khusus mengenai perkembangan pers di masa Demokrasi Terpimpin. Selain itu, buku biografi B.M. Diah juga digunakan dalam penelitian ini, seperti buku *B.M. Diah: Wartawan Serba Bisa* oleh Toeti Kakailatu tahun 1997. Di samping itu buku-buku kesejarahan seperti *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik* yang ditulis M. Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, buku *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 7* tahun 1989 dan buku *Sejarah Indonesia Modern* tulisan M.C. Ricklefs juga digunakan sebagai sumber untuk melihat pembahasan mengenai Demokrasi Terpimpin secara garis besar.

Selain buku-buku tersebut, penelitian ini juga akan ditunjang dengan sumber referensi berupa artikel-artikel penelitian, skripsi, serta tesis dengan tema dan topik terkait sebagai sumber tambahan. Skripsi yang ditulis Olga S. Pratama pada tahun 2018 yaitu *Sistem Pengawasan Pers di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, yang membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada pers pada masa Demokrasi Terpimpin. Skripsi karya Abi Bondan tahun 2022 *Peranan dan Kontribusi Surat Kabar Merdeka pada Masa Revolusi Fisik (1945-1949)*, juga skripsi karya Unggul Prasetyo tahun 2016 *Perkembangan Surat Kabar Merdeka Tahun 1949-1950* yang menuliskan tentang perkembangan surat kabar *Merdeka* pada masa Revolusi Fisik, beserta peranan dan kontribusinya. Skripsi lainnya ditulis oleh Ika Apriani Kusumadewi pada tahun

2011 berjudul *Peran Iklan Dalam Mengisi Kemerdekaan : Studi Kasus Surat Kabar Merdeka 1945-1949*, yang membahas peran aktif iklan pada surat kabar khususnya surat kabar *Merdeka* pada masa Revolusi Fisik dalam mengisi kemerdekaan. Sebuah tesis berjudul *Suara dari Dua Kota: Revolusi Indonesia dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka (Jakarta) dan Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta)* salah satu karya dari Andi Suwirta yang terbit pada tahun 1996, yang menuliskan tentang masa Revolusi Indonesia berdasarkan sudut pandang surat kabar *Merdeka* dan *Kedaulatan Rakyat*.

Langkah ketiga setelah mengumpulkan berbagai sumber adalah verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi ada dua macam: autentisitas, atau keaslian sumber atau kritik ekstern, dan kredibilitas atau kebiasaan dipercayai atau kritik intern (Kuntowijoyo, 2013). Pada tahap ini sumber-sumber yang telah diperoleh selanjutnya melalui tahapan kritik sumber guna mengevaluasi keandalannya sebagai sumber penelitian dan keterkaitannya dengan penulisan penelitian ini baik dari segi material maupun isinya. Sebagai contoh, ketika penulis menemukan sumber berupa arsip-arsip surat kabar *Merdeka* yang diedarkan pada periode 1960-1965, penulis akan melakukan verifikasi ekstern dengan memeriksa keasliannya. Verifikasi dilakukan kepada bahan dari kertasnya, apakah kertas tersebut adalah kertas yang diproduksi di tahun 1960-1965. Langkah ini dilakukan dengan menggunakan surat kabar lainnya yang sezaman sebagai pembanding. Selain itu, verifikasi juga dilakukan terhadap tinta dan cetakan huruf yang ditampilkan. Dilihat pula dari segi gaya penulisan, penggunaan tata bahasa dan ejaan, serta berbagai

istilah atau akronim yang digunakan dalam penulisan berita yang disajikan oleh *Merdeka* dipastikan sesuai dengan yang ada pada tahun 1960-1965.

Kemudian dilakukan juga kritik intern dengan membandingkan kebenaran isi berita yang tertulis di dalamnya dengan literatur kesejarahan lain dan artikel dalam surat kabar lain. Contoh penerapan kritik intern ini dilakukan pada pemverifikasian sebuah berita dalam terbitan harian *Merdeka*, misalnya pada harian edisi 13 Oktober tahun 1960 yang memuat berita tentang dikeluarkannya Peraturan Peperti (Penguasa Perang Tertinggi) No. 10/1960 mengenai pembaruan izin terbit pers dalam rangka menjadi alat pembela Manipol. Penulis akan meninjau dan menilai apakah yang dituliskan dalam berita tersebut benar adanya dengan membandingkannya dengan literatur sejarah lain seperti buku *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila* karya Tribuana Said tahun 1987, juga dengan buku *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia* dari Departemen Penerangan RI yang diterbitkan tahun 1980. Setelah ditinjau, ternyata benar adanya bahwa Peraturan Peperti tersebut dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 1960 setelah terlebih dahulu pemerintah menyampaikan surat kepada seluruh penerbit bahwa terbitannya harus menjadi pendukung Manipol, dan kemudian diberitakan oleh *Merdeka* sehari setelahnya yaitu 13 Oktober 1960.

Tahap keempat yaitu interpretasi, tahap penafsiran. Setelah bermacam-macam bukti ditemukan dan dicatat, semuanya itu harus dipertimbangkan lagi, karena bukti tidak dapat menjelaskan apapun tanpa tafsiran manusia (Frederick, 1982). Langkah ini merupakan upaya untuk menjelaskan fakta-fakta yang didapatkan dari berbagai sumber yang sudah didapatkan, kemudian dianalisis untuk merekonstruksi sejarah

yang akan ditulis pada tahapan terakhir. Interpretasi dilakukan dengan menganalisis fakta-fakta yang didapat dan sudah terbukti keabsahannya untuk menarik kesimpulan sehingga dapat dituliskan. Ketika sudah didapati fakta-fakta berdasarkan proses heuristik dan verifikasi, akan diupayakan untuk menafsirkan atau menginterpretasikannya secara objektif. Pada tahap ini penulis melakukan penafsiran terhadap makna dari suatu fakta yang sudah didapatkan dan menghubungkan antara satu fakta dengan satu fakta lainnya berdasarkan pemahaman penulis sendiri mengenai surat kabar *Merdeka* dalam krisis kebebasan pers pada masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965.

Tahap kelima, tahapan terakhir ini adalah penulisan. Fakta-fakta sejarah yang tadi sudah didapatkan melalui interpretasi, kemudian diseleksi dan disusun serta diurutkan secara kronologis dan sistematis. Dengan pendekatan deskriptif analitis menggunakan Teori Pers Otoriter dan Teori Hegemoni Antonio Gramsci, serta berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, hasil dari penelitian ini disajikan dalam tiga bagian, yakni pendahuluan, hasil, dan Kesimpulan.